

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PADA
SEKOLAH DI KOTA KUPANG)**

Eka Puteri Trisita Sine

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
e-mail: ekaputerisine@gmail.com

Maria E.D. Tunti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Sarinah Joyce Margaret Rafael

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
e-mail: joyce.rafael@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada sekolah di kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, bendahara, guru, komite, pengawas dinas PKPO Kota Kupang dan orang tua murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan juknis BOS yang dilakukan oleh sekolah kepada pihak-pihak terkait sedangkan transparansi dalam pengelolaan dana BOS belum berjalan dengan baik karena masih adanya kekurangan pada tahap publikasi.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana BOS, Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

This research is about Accountability and Transparency in the Management of School Operational Assistance (BOS) Funds. The purpose of this study was to determine accountability and transparency of the management of boss funds in school in the Kupang city. the research method used in this study was qualitative descriptive with data collection techniques using interviews, observation and documentation studies. The researcher interviewed several informants, namely the principal, treasurer, teacher, committee, supervisor of the PKPO service in Kupang city and also the parents of the students. The results of the study indicate that the implementation of accountability in the management of BOS funds has gone well seen from the form of accountability that is in accordance with the BOS technical guidelines carried out by the school towards the relevant parties whereas transparency in the management of BOS funds has not run well because there are still shortcomings in the publication stages

Keywords: BOS Funds Management, Accountability, Transparency

PENDAHULUAN

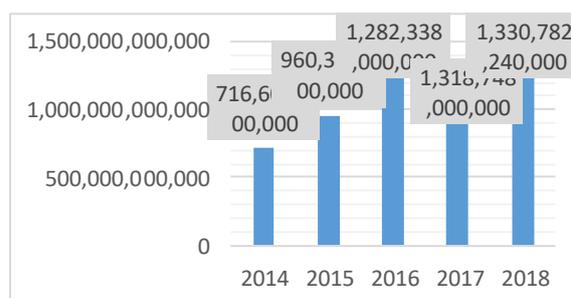
Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dari semua pilar, mulai dari sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang kondusif, sumber daya guru yang berkualitas, pendanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peran masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk bekerjasama kearah kualitas pendidikan yang lebih baik.

Salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah biaya pendidikan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu komponen dari biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan, swasta dan orang tua siswa.

Salah satu pendanaan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Non Personalia, BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib

belajar. Program BOS bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Dana BOS yang digunakan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar juga semakin membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahnya, karena dengan dana BOS, sekolah memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, perawatan dan menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Keberhasilan program pemerintah ini juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan di sekolah.

Gambar 1
Pertumbuhan Alokasi
Penerimaan Dana BOS Tahun
2014-2018



Sumber : Kemendikbud.go.id (2020)

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa alokasi dana BOS di NTT dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan dana BOS ini menunjukkan bahwa pemerintah bertujuan agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS di sekolah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari tingkat penyusunan anggaran, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban BOS. Tim manajemen sekolah masih kurang transparan dalam pengelolaan dana BOS sehingga adanya penyelewengan dana mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tetapi pada ketersediaan anggaran, penyalahgunaan keuangan untuk

memperkaya diri serta memanipulasi pelaporan keuangan.

Dalam penelitiannya Mujiono (2017) mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan dana BOS seperti pengelolaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis), dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara, dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan yaitu dengan tidak memasang papan informasi tentang dana BOS sehingga informasi mengenai dana BOS hanya diketahui oleh Kepala Sekolah sehingga membuka peluang adanya penyimpangan dana BOS serta sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dengan tujuan mempermudah mengolah dana BOS sendiri.

Dari permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti pengelolaan dana BOS yang ada di SD Inpres Lasiana, SMP Negeri 2 Kota Kupang dan juga SMK Negeri 1 Kota Kupang. Karena ketiga sekolah tersebut merupakan sekolah di Kota Kupang yang mendapat alokasi dana BOS terbesar. Ketiga sekolah ini memiliki jumlah peserta didik terbanyak untuk tiap tingkatannya dimana untuk SDI Lasiana memiliki jumlah peserta didik sebesar 928 siswa, untuk SMPN 2 Kota Kupang memiliki jumlah peserta didik sebesar 2.020 siswa dan untuk SMKN 1 Kota Kupang memiliki jumlah peserta didik sebesar 2.185 siswa. Peneliti juga akan meneliti di 3 sekolah yang mendapat alokasi dana BOS terkecil yaitu SD Negeri Danau Ina dengan jumlah peserta didik 25 siswa, SMP Negeri 18 dengan jumlah peserta didik 260 siswa dan SMK Negeri 8 dengan jumlah peserta didik 84 siswa. (<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>). Berdasarkan data tersebut, peneliti ingin meneliti pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah tersebut.

Melihat dari permasalahan diatas mengenai pengelolaan dana BOS, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Pada Sekolah Di Kota Kupang”. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana BOS?

KAJIAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Sekolah

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien. Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan uang. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik. Mulyono (2010:155) mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber pendapatan pendidikan saja, namun lebih kepada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan pencapaian efisiensi dana pendidikan, maka tercapai pula efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar bagi pelaksanaan program wajib belajar.
2. Tujuan Dana BOS Menurut Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Juknis BOS, secara umum program dana BOS bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Sasaran program dana BOS Menurut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Juknis BOS, sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMA/SMALB/SMK, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

3. Pengelolaan dana BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah Menurut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Juknis BOS, dikatakan bahwa BOS dikelola oleh SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawaban program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan kepala sekolah, bendahara dewan guru dan komite sekolah.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Transparansi

Menurut Ardianto (2007:31) transparansi berarti keterbukaan, sedangkan transparan di bidang manajemen yaitu adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan. Dalam Lembaga Pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan

sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi berarti keterbukaan (*open process*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Menurut Sugiyono (2018) desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti sebuah kondisi yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci.

Ruang Lingkup Penelitian

Jenis data dibagi atas dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu jawaban wawancara yang di dapat peneliti dari informan di tempat penelitian dan data kuantitatif yaitu RKAS dan laporan pertanggungjawaban dana bos.

Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS yang akan dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
Observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti akan membantu menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada informan penelitian.
- c. Studi Dokumentasi
Melakukan pencatatan data dari dokumen-dokumen yang terkait seperti pemaparan laporan keuangan dana BOS.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:134) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan catatan kecil dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menggunakan model analisis dari Milles dan Huberman yang terdiri dari empat unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan data
Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah menghimpunkan data. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau tes tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi

sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

- b. Reduksi Data
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data perlu segera dianalisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara sehingga data yang diperoleh banyak dan bisa saja berbeda. Reduksi dapat dilakukan dengan proses pengkodean manual. Istilah coding merupakan proses penerapan kode pada data hasil wawancara sehingga data dapat saling berhubungan dengan menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan di antara hasil wawancara.
- c. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan setelah tahap reduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Penyajian data memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian ini juga memudahkan peneliti menyusun kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.
- d. Penarikan Kesimpulan
Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal masih bersifat sementara, Simpulan ini akan berubah bila

ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat selama proses pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan maka simpulan yang dikemukakan di awal merupakan simpulan yang kredibel. Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang disusun sejak awal, mungkin juga tidak. Simpulan penelitian kualitatif bisa menjadi temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap. Hasil penelitian merupakan penjelas dari sesuatu yang remang-remang dan gelap itu. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu sekolah harus melaporkan penggunaan dana BOS kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah agar pihak-pihak tersebut dapat mengetahui dengan jelas penggunaan dana BOS oleh sekolah.

Dalam penelitian ini, enam sekolah ini yaitu SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang, SMPN 18 Kupang, SMKN 8 Kupang dan SMKN 1 Kupang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik di setiap tahapan pengelolaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, ke enam sekolah ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dimana sekolah mengikutsertakan berbagai pihak seperti kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah serta orang tua murid dalam penyusunan RKAS sehingga semua pihak terlibat dan ikut bertanggungjawab dalam penyusunan RKAS.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, ke enam sekolah ini melaksanakan setiap kegiatan di sekolah dengan mengikuti rancangan yang telah disusun dan disepakati sebelumnya sehingga setiap pelaksanaannya jelas dan diketahui oleh semua pihak di sekolah yang ada di sekolah.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, ke enam sekolah ini sudah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS yang sudah sesuai dengan juknis dimana laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tiap sekolah akan disosialisasikan kepada warga sekolah dan orang tua murid dalam rapat bersama dan juga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS juga akan dilaporkan kepada pihak pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kota Kupang. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara yang peneliti terima dari salah satu pengawas dinas PKPO dimana sekolah sudah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai juknis dimana laporan yang diterima dari sekolah yaitu RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak serta realisasi penggunaan dana tiap sumber dana. Selain itu sekolah juga sudah mensosialisasikan laporan pertanggungjawaban kepada warga sekolah dan orang tua siswa dalam rapat bersama di sekolah.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Mulayasa (2002:11) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah, dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkan dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mujiono (2017) dan Julantika (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berarti pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan sekolah kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada sekolah tersebut.

Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Transparansi pengelolaan dana BOS berarti adanya keterbukaan dalam penggunaan dana BOS yang jelas di sekolah agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya. Transparansi juga sangat dibutuhkan agar sapat meningkatkan dukungan orang tua, pemerintah dan masyarakat sehingga dapat menciptakan hubungan timbal balik antara orang tua, pemerintah dan masyarakat serta warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam kegiatan di sekolah.

Dalam penelitian ini, enam sekolah ini yaitu SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang, SMPN 18 Kupang, SMKN 8 Kupang dan SMKN 1 Kupang sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik di dalam tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawabannya.

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, ke enam sekolah ini sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik, dimana dalam proses penyusunan RKAS selalu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak guru yang tidak termasuk dalam tim BOS dan juga sudah memasang RKAS dalam bentuk sapnduk di area sekolah ataupun di papan informasi sekolah.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, ke enam sekolah ini menggunakan dana BOS yang diterima sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah disusun oleh sekolah sehingga setiap penggunaannya itu jelas dan diketahui oleh semua pihak dan setiap penggunaan dana BOS akan dilaporkan dalam rapat di sekolah.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban, ke enam sekolah ini sudah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai juknis yang berlaku atas setiap penggunaan dana BOS yang nantinya akan dilaporkan kepada warga sekolah, orang tua siswa dan

pemerintah. Pihak sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada warga sekolah dan orang tua murid melalui rapat bersama di sekolah dan juga memasang laporan pertanggungjawaban dalam papan informasi sekolah dan juga sekolah mengirimkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Kupang.

Hasil penelitian ini didukung teori oleh Ardianto (2007:31) yaitu transparansi berarti keterbukaan, sedangkan transparansi di bidang manajemen yaitu adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan. Dalam Lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mujiono (2017) dan Julantika (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berarti adanya keterbukaan informasi kepada *stakeholder*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan, yaitu:

1. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang, SMPN 18 Kupang, SMKN 8 Kupang dan SMKN 1 Kupang sudah berjalan dengan baik, dimana laporan pertanggungjawaban dana BOS sudah dibuat sesuai juknis dan laporan pertanggungjawaban dana BOS selalu dilaporkan oleh sekolah kepada pihak-pihak yang terkait.
2. Transparansi pengelolaan dana BOS di di SD Inpres Lasiana, SD Danau

Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang. SMPN 18 Kupang, SMKN 8 Kupang dan SMKN 1 Kupang, belum berjalan dengan baik, masih ada beberapa kekurangan dimana hanya SMKN 8 Kupang dan SMPN 18 Kupang yang memasang laporan pertanggungjawaban dana BOS di papan informasi sekolah sedangkan empat sekolah lainnya yaitu SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang dan SMKN 1 Kupang hanya memasang laporan RKAS di area sekolah, namun laporan pertanggungjawaban lainnya tidak dipasang di papan informasi sekolah. Sekolah juga harus mensosialisasikan secara khusus mengenai pengelolaan dan pelaksanaan dana BOS kepada orang tua siswa agar mereka lebih mengerti mengenai pengelolaan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Julantika, Tutus, Joko Supatmoko, Taufik Kurrohman. (2014). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Vol. 4 No. 1-5, 2017.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Mulayasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang diberikan yaitu:

1. Bagi Objek Penelitian
Diharapkan agar sekolah lebih transparan dalam memaparkan pengelolaan dana BOS seperti memasang laporan pertanggungjawaban dana BOS di papan informasi sekolah agar dapat diketahui oleh seluruh warga sekolah dan mensosialisasikan pengelolaan dana BOS secara khusus kepada orang tua siswa agar mereka lebih mengerti mengenai dana BOS di sekolah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan agar penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan perbandingan dari sekolah yang menerima dana BOS terbesar dan sekolah yang menerima dana BOS terkecil dengan melihat dari aspek kualitas pelayanan dan tingkat hasil pendidikan di sekolah tersebut.

Mulyono. (2010). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Gajah Mada.

Mujiono. (2017). "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (studi kasus pada SMP Negeri 4 Kota Banjar)". *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis*, Vol. 4 No.2, Oktober 2017.

Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Penerbit C.V Alfabeta.

<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>.
www.kemendikbud.go.id.